

**GENDER BUDGET STATEMENT**  
**(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama SKPD : Badan Keuangan  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 27 - 29 Bukittinggi  
Tahun Anggaran : 2021

Program : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tujuan Program : Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian Program : Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah

Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tujuan Kegiatan : Pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kode Rekening Kegiatan : 3.02.02.3.02.02.02.17.09

**Analisis Situasi** : Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah, maka melalui Keputusan Walikota Bukittinggi ditetapkan Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

Tugas dan tanggungjawab Pengurus Barang adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota tersebut

**Akses** laki-laki dan perempuan untuk pelaksanaan kegiatan ini terbuka luas.

Berdasarkan Keputusan Walikota maka Pengurus Baran ditetapkan sejumlah 142 Orang yang terdiri dari 39 orang laki-laki dan 103 orang perempuan

**Kontrol** pelaksanaan kegiatan ini berada pada Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD yaitu Walikota Bukittinggi, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD yaitu Wakil Walikota, Pengelola BMD yaitu Sekretaris Daerah dan Pengelola BMD serta Pengguna Barang Yaitu Kepala Badan Keuangan dan Kepala SKPD se Kota Bukittinggi

**Manfaat** Pengurus Barang yang berkompeten akan menghasilkan laporan BMD yang akurat dan pengelolaan BMD sesuai dengan aturan yang berlaku

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Jumlah Pengurus Barang Pengelola	0	1	1
2	Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengelola	1	1	2
3	Jumlah Pengurus Barang Pengguna	8	20	28
4	Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna	6	12	18
5	Jumlah Pengurus Barang Pembantu	24	69	93

- 1 Jumlah pengurus barang pengelola berjumlah 1 orang perempuan
- 2 Jumlah pembantu pengurus barang pengelola berjumlah 2 orang laki-laki dan perempuan berjumlah sama
- 3 Jumlah pengurus barang pengguna 8 orang laki-laki dan 20 orang perempuan
- 4 Jumlah pembantu pengurus barang pengguna 6 orang laki-laki dan 12 orang perempuan

Dampak/Manfaat  
(Outcome)

- 1 Jumlah laporan BMD yang dihasilkan 4 laporan, Jumlah dokumen yang disusun pengurus barang sebanyak 2 buku dan jumlah pengurus barang yang dibayarkan honoraria 142 orang
- 2 Pengurus Barang baik laki-laki maupun perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh bimbingan teknis
- 3 Pengambil keputusan penetapan pengurus barang memberi kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki dalam mengusulkan pengurus barang

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

  
**HERRIMAN, SH., M. Hum**  
**NIP. 19680525 199308 1 001**



**GENDER BUDGET STATEMENT**  
**(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama SKPD	: Badan Keuangan
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman No 27 - 29 Bukittinggi
Tahun Anggaran	: 2021
Program	: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tujuan Program	: Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku
Capaian Program	: Terlaksananya Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku
Kegiatan	: Penyusunan dan Pengesahan DPA dan DPPA
Tujuan Kegiatan	: Asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA terlaksana sesuai aturan yang berlaku
Kode Rekening Kegiatan	: 4.04.4.04.01.17.24

**Analisis Situasi** : Asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA diperlukan untuk mendapatkan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan aturan berlaku, dalam melaksanakan tugas ini perlu dibentuk tim yang terdiri dari koordinator, wakil koordinator dan anggota yang masing-masing memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan

Asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA dilakukan terhadap 28 SKPD, **Akses** laki-laki dan perempuan untuk pelaksanaan kegiatan ini terbuka luas.

Berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Jumlah anggota asistensi untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebanyak 14 orang, 6 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, wakil koordinator sebanyak 3 orang dan semuanya laki-laki

Pendidikan terakhir dari jenjang pendidikan minimal D3 dari tim asistensi ini sebanyak 9 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, pendidikan dengan basis keuangan sebanyak 1 orang laki-laki dan 6 orang perempuan, rata-rata telah lebih dari 3 tahun bekerja pada Badan Keuangan

**Kontrol** pelaksanaan kegiatan ini berada pada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan, Sekretaris Badan Keuangan dan Kepala Bidang Anggaran

**Manfaat** asistensi dan verifikasi membantu SKPD dalam pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Jumlah anggota asistensi dan verifikator	6 orang	8 orang	14
2	Jumlah Wakil koordinator untuk pelaksanaan kegiatan asistensi dan verifikasi pengesahan DPA dan DPPA	3 orang	0	3
3	Pendidikan terakhir Min D3	9 orang	8 orang	17
4	Pendidikan terakhir basis	1 orang	6 orang	7
5	Lama Bekerja pada Badan	8 orang	7 orang	15
6	Lama Bekerja pada Badan Keuangan < 3 tahun	1 orang	1 orang	2

**Akses** semua ASN pada Badan Keuangan (laki-laki dan perempuan) mempunyai peluang untuk melaksanakan asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD

Sebab kesenjangan diatas dari faktor internal adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan analisis gender pada kegiatan ini, sedangkan dari faktor eksternal adalah perempuan masih dianggap kaum pasif, lemah dan dependen yang hanya mampu melakukan pekerjaan administratif dan bidang pelayanan jasa. perempuan hanya sedikit yang menduduki jabatan managerial atau pengambil keputusan. Belum dipahaminya regulasi yang menegaskan keharusan melaksanakan pengarusutmaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan.

Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi	Asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku	
		Tujuan	Pelaksanaan asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku
		Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan pemahaman tentang tugas-tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan pada semua anggota tim</li> <li>2 Memberikan penajaman materi baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam melakukan asistensi dan verifikasi DPA dan DPPA</li> <li>3 Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berperan sebagai koordinator anggota tim</li> </ol>
		Sumber daya	<p>Jumlah Dana 114.150.000,00</p> <p>SDM</p> <p>Jumlah Tim 23 Orang</p> <p>L : 13 Orang P : 10 Orang</p> <p>Belanja pegawai 99.650.000</p> <p>Bahan pakai habis 1.700.000</p> <p>Fotocopy 600.000</p> <p>penggandaan</p> <p>Makan dan 12.200.000</p> <p>minum kegiatan</p> <p>Jumlah 114.150.000</p>
		Indikator Output	Terlaksananya asistensi, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA dari 28 SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku
Alokasi Sumber Daya	Dana	Jumlah Dana	114.150.000,00
	SDM	Jumlah Panitia	23 Orang
	Saran Prasarana	Laptop 3 unit	L : 13 Orang P : 10 Orang
Dampak/Manfaat (Outcome)	<p>Terlaksananya asistensi penyusunan DPA dan DPPA SKPD dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p>Diharapkan pelaku kegiatan terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan sama pada setiap jenjang level, baik itu koordinator ataupun anggota</p>		

KEPALA BADAN KEUANGAN  
KOTA BUKITTINGGI

  
**HERRIMAN, SH. MHum**  
NIP. 196805251993081001